

REVITALISASI HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DI ASIA PASIFIK

Suwarti Sari & Yanyan Mochamad Yani

Abstrak

Amerika Serikat (AS) sebagai tokoh tunggal dalam kekuatan dunia memainkan peran utama dalam mengubah sistem internasional. AS “berkewajiban” menjaga ketertiban dunia yang ditujukan dengan banyaknya personel militer yang dikirim keluar negeri guna menjalankan misi tersebut. Setelah memutuskan kembali ke Asia-Pasifik, AS menegaskan untuk membangun suasana saling percaya dengan negara-negara lain di kawasan. Dalam pelaksanaan strateginya, AS mengedepankan peran sekutunya dan membentuk jaringan yang meliputi seluruh dunia. AS secara aktif mengembangkan hubungan dengan NATO dan para sekutu-nya untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian, dan terus memperhebat strategi pindah poros ke Asia dan Pasifik.

Amerika Serikat meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Australia untuk meningkatkan akses militer Amerika Serikat terhadap fasilitas militer Australia. Bagi Australia, AS akan tetap menjadi aktor di Asia Pasifik. Hadirnya armada AS di Darwin, Australia akan memberikan rasa nyaman dan aman secara politik dan militer, mengingat kepentingan mereka sejalan untuk membendung kekuatan dari Utara (Asia).

Kata kunci: Australia, Amerika Serikat, Asia Pasifik, militer, revitalisasi.

Pendahuluan

Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan muncul Amerika Serikat (AS) sebagai tokoh tunggal dalam kekuatan dunia. Menyandang sebagai satu-satunya negara adidaya, AS menjadi sangat tidak tertandingi oleh pihak mana pun, bahkan tidak memiliki sebuah ancaman yang berada dekat tepat di belakang maupun di hadapannya. Hal ini mendorong AS untuk melakukan pengkajian ulang terhadap strategi dan doktrin militernya. Termasuk postur kehadiran kekuatan militer AS di berbagai kawasan.

AS menggerakkan politik luar negerinya hingga ribuan bahkan puluhan ribu mil dari teritorialnya, sehingga AS bisa mempertahankan kekuatan pengaruhnya dan mendukung operasional militernya dari lokasi di mana kebijakan diterapkan dengan menempatkan pasukan dan upaya pembangunan pangkalan militer secara permanen. Kebijakan penempatan pangkalan militer merupakan variabel penting dalam strategi pertahanan AS sebagai bagian dari kekuatan penggetar (*deterrence*) yang berfungsi sebagai pangkalan untuk menghadapi kekuatan Unisoviet dan sekutunya pada masa perang dingin. Demikian pula dalam perang Vietnam (1955-1975), pangkalan-pangkalan militer AS di Filipina, Thailand, serta fasilitas-fasilitas di sejumlah negara seperti Singapura, menambah dorongan untuk mempertahankan kehadiran AS di kawasan, khususnya Asia Pasifik.

Kebijakan mengedepankan sekutu

Pasca Perang Dingin secara perlahan AS mengurangi kehadirannya di Asia Pasifik dengan cara mengedepankan sekutu-sekutunya dan membangun konstruksi keseimbangan strategis yang dilandaskan pada keberadaan sekutu-sekutunya di kawasan. Penyesuaian postur kehadiran militer AS di Asia Pasifik, pada hakikatnya dilandasi oleh penilaian bahwa situasi keamanan di kawasan relatif tidak mengancam kepentingan-kepentingan AS.

Perkembangan tersebut mengakibatkan pergeseran sistem internasional dan perimbangan kekuatan dalam politik dunia. Hal ini ditandai dengan munculnya negara-negara *middle power* dan *major power* di level kawasan. Perkembangan signifikan terjadi di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Bidang ekonomi dan militer, telah memunculkan kawasan Asia Pasifik sebagai pusat aktivitas dunia internasional. Munculnya Cina sebagai *new emerging power* dan *great economic power*, membawa Amerika Serikat (AS) kembali mengalihkan fokus perhatiannya pada kawasan Asia Pasifik dengan membangun kembali dan mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara sekutunya. Amerika Serikat (AS) telah menerapkan suatu kebijakan strategis yang dinamakan “*US Rebalancing Strategy*”. Implementasi kebijakan *Rebalancing strategy* telah mengubah kekuatan militer AS di kawasan. *Rebalance* mempunyai elemen diplomasi, ekonomi dan militer. AS tidak akan mengurangi Investasi pertahanannya di Asia

Pasifik walaupun ada kecenderungan mengurangi belanja pertahanannya.

Amerika Serikat memainkan peran utama dalam mengubah sistem internasional sebagai negara *superpower*, sehingga AS “berkewajiban” menjaga ketertiban dunia dengan ikut terlibat langsung dalam setiap sengketa yang melibatkan negara adidaya (Yehuda, 2011:101). Konsekuensinya adalah dengan banyaknya personel militer yang harus dikirim keluar negeri guna menjalankan misi tersebut. Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk Asia Pasifik adalah Komando Pasifik, yang wilayah kerjanya mencakup Alaska dan Kutub Utara, Samudera Hindia dan Asia Tenggara. Komponen Komando Pasifik termasuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, marinir dan pasukan khusus. Dalam hal Angkatan Darat, *US Army Pacific Command* dipelopori oleh Divisi Infanteri ke-25 di Hawaii dan Alaska. Seiring dengan pasukan yang ditempatkan di Jepang, Korea Selatan, Alaska, Hawaii, *US Army Pacific Command* menguasai lebih dari 106.000 tentara di Asia-Pasifik, bersama dengan lebih dari 300 pesawat dan helikopter, serta lima armada angkatan laut (www.dmdc.osd.mil, 2015).

Filipina adalah salah satu sekutu AS, meski saat ini tidak ada pangkalan militer yang menduduki Filipina, karena pangkalan militer terbesar *Subic Naval Base* dan *Clark Air Force Base*, yang terletak di pulau Luzon telah diserahkan kembali ke pihak Filipina tahun 1991-1992. Hubungan pertahanan militer antara kedua negara tersebut tetap kuat. Pada bulan Oktober

2003, AS menyatakan Filipina berstatus sebagai *Major Non-NATO Ally*. Sama seperti Filipina, saat ini tidak ada pangkalan militer di wilayah Thailand. Keberadaan personal militer dalam jumlah besar di Thailand tidak terjadi kembali setelah perang Vietnam berakhir dimana tahun 1970 seluruh pangkalan udara AS diserahkan kepada Thailand. Pada tahun 2003, Thailand terkategori *Major Non-NATO Ally*. Dengan status tersebut, Thailand menerima berbagai peralatan, suplai, pelatihan dan bantuan militer dari AS.

Diego Garcia menjadi letak pangkalan yang sangat strategis yang dimiliki AS. Sebuah Karang Atol dan pulau terbesar di kepulauan Chagos yang termasuk teritorial Inggris, mendukung integrasi US PACOM dan US CENTCOM. Diego Garcia berfungsi sebagai pangkalan militer untuk angkatan udara dan laut AS. Diego Garcia dapat menampung kapal perang berukuran besar dan menjadi pangkalan pendukung kapal selam, komunikasi, dan logistik bagi berbagai operasi regional AS. Jumlah kekuatan militer yang ditugaskan di pangkalan ini sebanyak 241 personil (Kemhan, 2012:37). Berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Inggris pada 30 desember 1966, AS diizinkan untuk menggunakan *British Overseas Territory* tersebut untuk kepentingan pertahanana selama 50 tahun (berakhir tahun 2016), dengan opsi perpanjangan waktu penggunaan selama 20 tahun (hingga 2036). Selama berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah, seperti Perang Teluk, invasi Irak ke Kuwait, perang Afghanistan dan Irak, Diego Garcia berperang sebagai pendukung operasi

pengeboman dan operasi pendukung bagi militer AS. Saat ini *Navy Support Facility (NSF)* di Diego Garcia berfungsi untuk memberikan dukungan logistik bagi pasukan yang digelar di wilayah Samudera Hindia dan Teluk Persia, yang menjadi struktur penghubung vital bagi pertahanan AS. Dari Diego Garcia, AS dapat memproyeksikan kekuatannya ke Timur Tengah, Afrika Timur, India, Australia, dan Indonesia.

Setelah AS memutuskan untuk kembali ke Asia-Pasifik, tugas tentara Amerika Serikat lebih diperluas lagi, begitu pula dengan objek penjagaan keamanan para mitra dan negara-negara yang bukan sekutu-nya, tetapi punya kepentingan strategis bersama dengan Amerika Serikat. Pada forum internasional tahunan keamanan di Asia-Pasifik, AS menegaskan untuk membangun suasana saling percaya dalam hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain di kawasan, membantu negara-negara tersebut memecahkan masalah-masalah mereka dan menjamin stabilitas dan keamanan di wilayah negara-negara itu.

AS telah menempatkan Australia dan Jepang nilai lebih pada kerjasama keamanan bilateral. Pada 5 Juli 2015, AS, Australia, Jepang dan Selandia Baru melakukan latihan bersama skala besar di wilayah bagian utara Queensland melibatkan 30.000 personil (www.dmdc.osd.mil). Ini menjadi yang pertama kali Pasukan Bela Diri Jepang bergabung. Latihan militer ini menunjukkan bahwa AS benar-benar memperluas dimensi kerjasamanya antara AS-Jepang-Australia kerjasama tiga dimensi menunjukkan kekuasaan

mutlak AS menurun, sehingga dalam pelaksanaan strategi menyeimbangkan Asia-Pasifik, AS berharap sekutunya dapat memainkan peran lebih. Sekutu dan mitra AS telah membentuk jaringan yang meliputi seluruh dunia.

AS menekankan penguatan hubungan dengan sekutu, fokus untuk keamanan. Strategi militer nasional AS menunjukkan bahwa AS akan secara aktif mengembangkans hubungan dengan para sekutu-nya untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian, menekankan akan mengembangkan hubungan dengan NATO, Jepang, Republik Korea, Australia dan terus memperhebat strategi pindah poros ke Asia dan Pasifik, memusatkan persenjataan dan kemampuan-nya di kawasan strategis ini. AS membuat jaringan di kawasan Asia-Pasifik sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai AS yang mencakup berbagai kemitraan dan organisasinya. AS menyeimbangkan kawasan Asia-Pasifik, dengan menempatkan kemampuan yang paling canggih dengan kapasitas yang lebih besar.

Berdasarkan design strategis ini, pengaruh kebijakan AS di Asia-Pasifik akan menjadi tantangan bagi negara-negara yang menjadi target AS di kawasan ini. AS akan terus memperkuat pengerahan militernya maju dan masuk di kawasan Asia-Pasifik. AS tengah melakukan penyesuaian strategis militer untuk mempertahankan hegemoni global, dan masing-masing penyesuaian strategis militer menciptakan situasi yang kompleks di wilayah sasaran.

Pangkalan dan Strategi di Darwin

Tahun 2011, Australia dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan *Australia-United States Ministerial Consultations (AUSMIN)* di San Fransisco, dalam pertemuan ini Australia dan Amerika Serikat membahas tentang peningkatan kerjasama pertahanan. Peningkatan kerjasama pertahanan antara Australia dan Amerika Serikat yang bertujuan untuk merespon dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik. Kesepakatan ini selain untuk meningkatkan akses militer Amerika Serikat terhadap fasilitas militer Australia juga menjadikan Australia sebagai salah satu pusat logistik militernya.

Darwin, kota terbesar di utara Australia, adalah lokasi vital bagi Australia dalam mempertahankan kedaulatannya. Australia mengembangkan pelabuhan Darwin, pos militer dan lapangan udara sengaja dibangun di pesisir dan senjata anti-pesawat ditempatkan disana. Darwin dipandang sebagai pelabuhan utama bagi Sekutu dan pasukannya terkait pula dengan Hindia Belanda (sekarang Indonesia dan Timor Timur). Disebut vital karena dalam sejarahnya, Darwin menjadi basis bagi pertahanan Australia dari ancaman Jepang ketika itu. Dalam perkembangannya kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Asia dibawah pemerintah Liberal-Nasional Country pada saat itu (1950-1972), lebih menonjolkan keikutsertaan Australia di dalam aliansi militer Barat di bawah Amerika Serikat, seperti dalam Pakta ANZUS (Australia, New Zealand and United States) yang dibentuk tahun 1951 dan

Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO) yang dibentuk tahun 1954, dan Pakta Pertahanan Lima Negara (*Five Powers Defence Arrangement-FPDA*) yang dibentuk pada tahun 1971 antara Inggris, Australia, New Zealand, Malaysia dan Singapura untuk membantu Singapura dan Malaysia apabila kedua negara tersebut mendapat ancaman dari luar (Ikrar Nusa Bakti, 1996).

Amerika Serikat akan tetap menjadi aktor di Asia Pasifik sekurang-kurangnya hingga 2030 (Buku Putih Pertahanan Australia, 2009 hlm 31-32). Hal ini disadari oleh Australia sebagai mitra utama AS di Pasifik, selain Jepang dan Filipina. Namun kiranya Australia akan menjadi sekutu terdekat AS selama Australia pun mempunyai kepentingan yang senada dengan AS. Dengan hadirnya armada AS di Darwin, Australia akan merasa nyaman dan aman secara politik dan militer mengingat kepentingan mereka sejalan, yakni membendung kekuatan dari utara (Asia).

Kenyataan ini dilandaskan pada kebijakan politik luar negeri AS yang menginginkan adanya kestabilan, keseimbangan dan harmoni global, menghindari konflik dan mendahulukan azas kerjasama (Yahuda, 2011:107). Sebagai mitra dan sekutu terdekat, AS menjadikan Australia sebagai induk dan hubungan diantara keduanya adalah saling menguntungkan. Kesadaran akan kemampuan hegemoni global dan regional khususnya di kawasan Asia Pasifik memerlukan komitmen yang kuat baik dari kebijakan AS maupun mitranya. Terlebih dengan “*agresif-ekspansionis*”-nya Cina dalam tiga dekade terakhir membuat peta konflik menjadi

sukar untuk dirumuskan, baik dari segi militer maupun dalam bidang lainnya. Jika AS tidak memiliki sekutu yang kuat dikawasan ini dikhawatirkan efek domino abad 21 akan terjadi dan yang terdekat adalah Asia Tenggara. Persoalannya adalah Asia Tenggara merupakan kawasan yang ‘netral’ dan tidak menghendaki masuknya ‘intervensi’ asing disana apalagi diajdikan arena *proxy war* bagi superpower (ASEAN PSC *Blueprint*, 2009). Kendati demikian Asia Tenggara terbuka dengan semua mitra yang dinilai akan membantu pengembangan kawasan, baik dengan Cina maupun dengan AS. Oleh karenanya, sangat masuk akal jika Australia menjadi kawan strategis yang dapat mengikuti irama AS dalam mengelola kestabilan kawasan.

Kedinamisan interaksi global menuntut tiap negara melakukan improvisasi sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Banyak cara dilakukan, salah satunya adalah dengan memperkuat ikatan kerjasama militer. Dalam hal ini, AS paham sekali bahwa Asia Pasifik adalah ladang yang sewaktu-waktu dapat dipanen oleh kekuatan besar (Cina). Oleh karenanya, *containment* model baru diterapkan yakni melalui kebijakan *rebalancing Asia Pacific* (2012). Model seperti ini lebih disukai para sekutu AS di Pasifik. Selain karena negara mereka terlindungi, juga karena ada kepastian perlindungan melalui pakta pertahanan atau kerjasama pertahanan yang mengikat karena mereka khawatir akan ancaman dari negara yang memiliki kapasitas militer setara AS (Buku Putih Australia, 2009, hlm 50).

Globalisasi juga berimbas pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Kemutakhiran teknologi dan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi merupakan hal yang niscaya. Hal ini memberikan pengaruh terhadap pertukaran informasi intelegen dari hampir semua negara di dunia untuk mendefinisikan ancaman bagi negaranya. Sayangnya, akses tak terbatas hanya dimiliki oleh AS dengan semua kemampuannya dan berkat kolaborasi sekutu dan mitra yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Penempatan pasukan dan kemitraan dengan Australia tidak hanya ditujukan untuk ‘mengamankan’ Asia Pasifik, melainkan membendung, mengantisipasi dan menyerang musuh yang berasal dari utara. Meskipun di utara sudah ada Jepang dan Korea Selatan yang berperan menjadi *back up* AS di Pasifik, hal itu dirasa belum cukup mengingat terlalu riskan hanya dengan mengandalkan dua sekutu tersebut. Sedangkan di kawasan Timur Jauh terdapat rival utama seperti Cina, Korea Utara, dan Rusia. Maka pilihan rasional adalah dengan pengoptimalan kerjasama dengan Australia. Dengan meningkatnya segala kemungkinan tersebut maka AS memiliki pilihan rasional dalam memanfaatkan saluran dan kerjasama dengan para sekutu sebagai mitra global dalam rangka menyelaraskan kepentingannya. Tujuan AS dalam setiap kebijakan luar negeri adalah untuk selalu memenangkan setiap pertempuran (The NMS of USA, 2015).

Terdapat dua pendekatan yang digunakan AS (The NMS of USA, 2015) untuk memenangi pertempuran. Pertama yaitu,

Deter, Deny and Defeat dan kedua *Disrupt, Degrade and Defeat*. Pendekatan pertama dilakukan secara total untuk melindungi tanah air (*homeland*) dan menjamin keamanan para sekutu. Ini adalah langkah preventif dari sebuah sistem untuk mengalahkan musuh karena AS memiliki kepercayaan akan kepemilikan total sumber daya baik domestik maupun sumber daya sekutu yang akan mampu memberikan akses penuh dalam implementasinya. Konsep *deter* (menggertak) digunakan untuk memukul musuh sebelum musuh memukul. Jika langkah ini gagal maka *denying* (penolakan) terhadap agresi (fisik dan non fisik) tersebut dilakukan dengan menyerang balik (*counter attack*) yang dilanjutkan dengan melumpuhkan (*to defeat*) musuh.

Pendekatan kedua, *disrupt* (mengacaukan, menghancurkan) musuh dilakukan jika eksistensi musuh telah nyata (e.g terorisme) dan dilakukan dengan menyerang instalasi dan objek vital musuh (*VEO's vital object / violent extremist organisation*) sehingga akan mengacaukan segala perencanaan dan operasi mereka. *Degrade* dilakukan sebagai upaya mengurangi kapabilitas mereka dalam merencanakan penyerangan selanjutnya hingga kemudian musuh dapat dilkalahkan.

Strategi ini tidak dapat dijalankan jika semua unsur tidak memberikan komitmen dan visi yang sejalan. Hal ini bisa dilihat dari gagalnya AS mempertahankan SEATO dalam jangka waktu yang lama (Yehuda, 2011). Pendekatan kebijakan pertahanan kolektif di lingkungan regional Asia Tenggara tidak bisa

dilakukan dengan pendekatan konservatif. Berbeda halnya dengan kerjasama dengan Australia melalui ANZUS dan kerjasama bilateral. Penguatan kerjasama dengan sekutu dan mitra di lingkup regional dan global terus diupayakan dan ditingkatkan mengingat ancaman yang dipersepsikan AS juga semakin kompleks dan multidimensi.

Penutup

Revitalisasi hubungan AS dengan negara-negara sekutunya dikawasan Asia Pasifik merupakan bagian dari kebijakan strategis AS yang dinamakan “*US Rebalancing Strategy*”. *Rebalance* mempunyai elemen diplomasi, ekonomi dan militer. AS memindahkan dan menempatkan sumber daya militer dan pasukannya dari Timur Tengan ke Asia Pasifik (Darwin, Australia, di sekitar Singapura dan Filipina, Okinawa, Guam, Hawaii dan Alaska). Selain membendung kekuatan Cina, AS juga memanfaatkan pertumbuhan ekonomi global di kawasan ini untuk pemulihan ekonomi di negaranya.

Daftar Pustaka

- Bower Ernest.etc. 2012. *U.S. Force Posture Strategy in the Asia Pacific Region: An Independent Assessment*. Center for Strategic and International Studies. Washington
- Etzioni, Amitai. 2014. *International Prestige, Competition, and Peaceful Coexistence*. Institute of War and Peace Studies
- Gray, Colin S. 2014. *Strategy and Defence Planning: Meeting the Challenge of Uncertainty*. Oxford University Press

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta

_____, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. 2011. *Kehadiran Militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik: Implikasi bagi Pertahanan Negara Indonesia*

Maersheimer, John.2006. *International Relation Theory*. Oxford University

Mochtar Mas'ood, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta

Morgan, Patrick M. 2003. *Deterrence Now*. Cambridge University Press

Wickett, Xenia, dkk. 2015. *The Asia-Pacific Power Balance Beyond the US-China Narrative*. Chatham House the Royal Institute of International Affairs. London

Yahuda, Michael.2011. *The International Politics of the Asia-Pacific*. London and New York: Routledge

<http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/japanese-bombing-of-darwin>

www.dmdc.osd.mil

<https://www.csis.org/analysis/australia-us-ministerial-ausmin>, diakses 2 Maret 2017